

Efektivitas Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab)

Muhammad Raihan Alhazra¹ Sujianto²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: muhammad.raihan2409@student.unri.ac.id¹

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meluncurkan Program Bajak Gratis sebagai solusi ekonomi bagi petani. Namun, aturan yang terkait menyebabkan pelaksanaan program bajak gratis tidak ideal, terutama di kecamatan Sungai Tarab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif program bajak gratis dilaksanakan. Selanjutnya, penelitian melihat dampak yang mungkin terjadi jika bantuan bajak gratis tidak diberikan kepada petani penggarap di Kecamatan Sungai Tarab. Teori efektivitas program menurut Budiani digunakan dalam penelitian. Teori-teori ini mencakup ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu studi kasus. Dua tujuan penelitian dijawab oleh penulis melalui wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen. Menurut penelitian, ada beberapa kendala yang menghalangi pelaksanaan program bajak gratis di Kecamatan Sungai Tarab. Di antaranya adalah data DTKS yang tidak diperbarui tentang petani penggarap yang memiliki ekonomi yang kurang baik; penutupan penyaluran bantuan BBM karena larangan penjemputan BMM dengan jerigen; dan tidak ada peraturan yang jelas tentang bagaimana bantuan harus diberikan secara adil kepada petani penggarap sawah yang kekurangan air. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan optimalkan penyaluran bantuan petani (bantuan minyak); sarana pendukung, seperti perbaikan irigasi dan pengadaan sistem pompanisasi di sekitar sawah tadah hujan di Kecamatan Sungai Tarab.

Kata Kunci Efektivitas Program, Prosedur, Bajak Gratis

Abstract

The Free Plow Program, launched by the Tanah Datar District Government, aimed to provide economic assistance to farmers. However, the program faced challenges in Sungai Tarab sub-district due to issues with the associated regulations. This study conducted research to assess the effectiveness of the program and analyze the potential impact if free plow assistance was not provided to sharecroppers in Sungai Tarab. Budiani's theories of program effectiveness, including program targeting accuracy, program socialization, program objectives, and monitoring, were used as the framework for the research. A qualitative methodology, specifically a case study, was employed, with interviews, observations, and document searches. The research revealed several obstacles that impeded the implementation of the free plow program in Sungai Tarab sub-district. Among these are DTKS's outdated data on tenant farmers who are economically disadvantaged; the closure of the distribution of fuel assistance due to the prohibition of picking up petroleum with jerry cans; and no clear regulations on how assistance should be given fairly to tenant farmers who lack water. The Tanah Datar District Government is advised to optimize the distribution of farmer assistance (petroleum); supporting facilities, such as irrigation improvements and the procurement of pompanization systems around rain-fed rice fields in Sungai Tarab District.

Keywords: Program Effectiveness, Procedures, Free Plow



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu inisiatif utama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar adalah Program Bajak Gratis, yang membantu petani dengan biaya produksi mereka. Hal ini terutama berlaku untuk petani penggarap yang dikategorikan sebagai Kartu Keluarga (KK) miskin, atau

disingkat "kartu miskin", serta menerima bantuan uang tunai, bahan bakar, dan pinjaman alsintan (traktor). Kesulitan yang dihadapi produksi pertanian Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019-2021, khususnya pertanian padi karena tingginya biaya produksi padi untuk pengolahan lahan (membajak sawah) menjadi pendorong terciptanya skema tersebut. Pembentukan program kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai tanggapan atas isu tersebut melalui PERDA Tanah Datar No. 4 Tahun mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar 2021-2026 dalam Bab V-15 berisi sebuah program unggulan yaitu Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah. Pihak pelaksana program Bajak Gratis oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang berkolaborasi dengan Kementan RI, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Gapoktan, Poktan, UPJA serta SPBU (Pasal 22 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis). Adapun pihak dengan keterlibatan langsung guna pelaksanaan program bajak gratis secara teknis diantaranya (1) Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, (2) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan, (3) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), (4) Ketua Kelompok Tani, (5) Wali jorong, (6) Petani Penggarap. Dengan sistematisa koordinasi serta keterlibatan langsung guna melaksanakan program bajak gratis (Iosa, *et al.*, 2022).

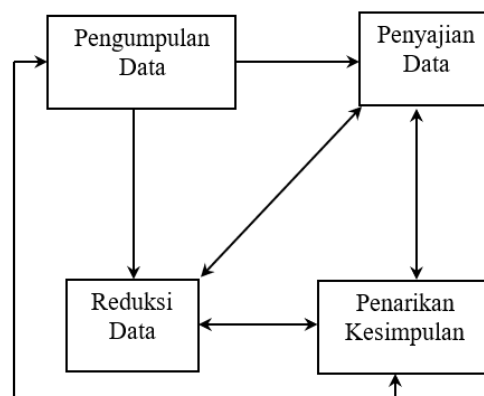
Menurut data, kecamatan Sungai Tarab menjadi kecamatan dengan capaian permohonan telah selesai terbanyak dalam program layanan ini sebanyak 347 petani. Kemudian kecamatan Padang Ganting sebanyak 340 petani, lalu kecamatan Salimpaung sebanyak 243 petani. Sedangkan kecamatan dengan capaian terkecil adalah kecamatan Tanjung Emas sebanyak 18 petani. Jumlah Kelompok Tani i Tanah Datar sebanyak 1.816 Kelompok Tani dengan total petani terdata sebanyak 69.032 orang. Sementara apabila dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat program bajak gratis pada akhir periode tahun 2022 tercatat hanya 7.848 orang (11,3%) yang mampu menerima manfaat program bajak gratis. Angka menunjukkan program ini hanya menyentuh sebagian kecil petani. Target kinerja layanan bajak gratis tahun 2022 yaitu 4.200 hektar melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai APBD 2022. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian menjelaskan bahwa selama tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggunakan dana Rp 5,2 Milyar untuk menjalankan Program Bajak gratis ini dengan rincian Rp 686 juta (13,09%) untuk pembelian peralatan, Rp741 juta (14,13%) untuk pembelian kendaraan operasional roda 4, Rp. 3,7 Milyar (71,94 %) untuk gaji / honor pegawai dan upah operator, dan Rp.44,2 juta (0,84 %) untuk seremonial. Porsi belanja paling besar untuk biaya gaji / honor pegawai dan upah operator sebanyak Rp. 3.772.535.300.- (3,7 Milyar) atau 71,94% dari total belanja untuk program ini (Intania, 2023).

Untuk mendapatkan hasil program yang maksimal dan mendukung tercapainya tujuan program, maka proses penyaluran Bantuan Bajak Gratis harus selaras kesesuaian data penerima bantuan serta perbaikan sistem penyaluran sehingga bantuan tepat sasaran dan merata bagi masyarakat seharusnya menerima. Hal tersebut disarikan pada proses disalurkan program yang beberapa waktu belakangan ini berjalan lambat terutama bagi petani yang sangat yang membutuhkan. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Sungai Tarab berdasarkan hasil wawancara awal penulis, salah satu penyebabnya adalah data DTKS yang belum sinkron dengan data SIMLUHTAN. Berdasarkan keterangan wawancara awal juga diketahui pelaksanaan program bajak gratis ini kurang efektif guna penentuan penerima bantuan yang hanya diperoleh pada DTKS dari Dinas Sosial PPPA. Sehingga menghasilkan ketidaksesuaian data penerima bantuan bajak gratis sehingga dimuat masyarakat yang bukan petani dan tidak mempunyai sawah ataupun menggarap sawah. Kemudian dampak data DTKS yang tidak disinkronkan dengan data SIMLUHTAN membuat petani yang terdaftar dalam SIMLUHTAN

namun tidak terdaftar didalam DTKS tidak dapat menjadi penerima manfaat walaupun bekerja sebagai petani penggarap dan sangat butuh dibantu. Fenomena di atas merupakan indikasi kurang efektifnya pelaksanaan program bajak gratis ini sehingga berjalan lambat dan membingungkan petani. Belum optimalnya program ini pun diharapkan guna pacuan seluruh pihak terkait guna bersama untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Bajak Gratis di Kecamatan Sungai Tarab sehingga pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan peraturan dan prosedur. Berdasarkan fenomena, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar khususnya pada Kecamatan Sungai Tarab sudah berjalan efektif atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendalami masalah yang berkaitan langsung di lapangan tempat permasalahan tersebut terjadi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tarab dengan lokasi penelitian di Dinas Pertanian Kab. Tanah Datar yang beralamat di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung, Batusangkar dan BPP Sungai Tarab yang berlokasi di Jalan Raya Batusangkar–Bukittinggi km. 4, Kabupaten Tanah Datar. Untuk mendapatkan informan yang baik dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive sampling yakni penentuan informan yang dipilih berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu yang sesuai dan memiliki kompetensi yang artinya subjek tersebut memahami dan menguasai permasalahan dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan yang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, BPP Kecamatan Sungai Tarab, Wali jorong, Ketua Kelompok Tani dan petani penerima program Layanan Bajak Sawah Gratis Kabupaten Tanah Datar, dan pihak lain yang terlibat langsung dalam program tersebut. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah dan dokumen kasar atau halus. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini Reduksi Data, Penyajian Data, penarikan Kesimpulan,



Gambar 1.
(Miles dan Huberman, 2014)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Program Layanan Bantuan Bajak Gratis

Program bajak gratis Kabupaten Tanah Datar merupakan alat operasional kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar 2021-2026 yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten

Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar melalui peningkatan PDRB per kapita, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih proaktif. Hal tersebut kemudian diwujudkan Bupati dan Wakil Bupati membentuk salah satu program unggulan yang berpihak kepada masyarakat khususnya petani penggarap yang berekonomi kurang mampu dan dapat berimbas terhadap produktivitas pertanian. Salah satu kinerja pertanian yang menghambat adalah biaya produksi. Untuk itu pemerintah mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan alsintan, khususnya dalam proses pembajakan sawah. Upaya dalam efisiensi biaya produksi pertanian menggunakan bantuan pembajakan sawah diharapkan biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh petani tidak besar dan dapat meningkatkan keuntungan petani. Pemberian bantuan bajak gratis untuk masyarakat yang berkehidupan sebagai petani tersebut, diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis yang berlaku untuk pelaksanaan di tahun 2022 kemudian terjadi perubahan isi menjadi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) program yang memuat tata cara pelaksanaan layanan bajak gratis. Oleh karena itu untuk melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan bupati tersebut, khususnya bantuan biaya produksi padi kepada petani di Kecamatan Sungai Tarab dan menjamin akuntabilitas, pemerataan, dan kelancarannya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian yang bertugas dalam perencanaan, pembiayaan, serta pengadaan sarana dan prasarana yang dibantu oleh organisasi penunjang fungsi penyuluhan pertanian yaitu Balai Penyuluhan Pertanian di tempatkan di masing-masing kecamatan.

Fenomena Dalam Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Sungai Tarab

Pelaksanaan program bajak gratis di Kecamatan Sungai Tarab pada pelaksanaannya ditemukan fenomena yang diperlukan perhatian dari pihak pelaksana program kebijakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang terdapat fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Fenomena pertama yaitu ditemukannya kekurangan dalam validitas data petani yang tergabung dalam DTKS dan SIMLUHTAN. Selama diselenggarakan program ini pada tahun 2022, penulis mendapati keterangan dari sejumlah petani bahwasanya pada kenyataannya pendataan petani yang terdaftar dalam bajak gratis tidak sepenuhnya akurat, karena pembaharuan petani DTKS tidak setiap saat diperharui dan sulit untuk mendapatkan angka pastinya, dengan begitu petani yang tidak terdaftar ke dalam DTKS menjadi tersisihkan, hal ini menunjukkan pemilihan petani kurang efektif. Pada akhirnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis maka DTKS sudah tidak menjadi ketentuan wajib yang harus dipenuhi oleh petani, sehingga kriteria ini menjadi lebih longgar dan membuka peluang bagi para petani yang tidak terdaftar di dalam DTKS untuk berkesempatan mendapat bantuan di tahun selanjutnya. Fenomena kedua yang menghambat pelaksanaan program layanan bajak gratis di Kecamatan Sungai Tarab adalah keterbatasan anggaran. Yang dimaksud disini yaitu anggaran yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan bantuan untuk bajak gratis ini tidak direncanakan dengan matang sebelumnya, terbukti pemerintah telah menjanjikan bantuan bajak gratis ini meliputi

bantuan tunai dan bantuan BBM kepada setiap petani, namun kenyataan di lapangan terkhusus bantuan BBM tersebut dihentikan sendiri pada tahun 2022. Adapun fenomena ketiga yang secara tidak langsung menghambat pelaksanaan program bajak gratis bagi para petani yaitu faktor kekeringan. Berdasarkan data dari BPP Kecamatan Sungai Tarab sawah tadah hujan di Sungai Tarab berjumlah 822 Ha dan Sawah irigasi 1583 ha yang ditotalkan menjadi 2402 ha sawah. Menurut observasi penulis bahwa kondisi lahan yang kering pada sawah tadah hujan memperlambat pelaksanaan program bajak gratis, misalnya petani yang telah terpilih menjadi penerima manfaat program akhirnya tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut disebabkan sawah yang kekeringan. Sementara pengelolaan air dalam usaha tani sawah berperan sangat penting bagi keberlangsungan pertanian mulai dari pra tanam hingga masa panen. Jika ketersediaan air tidak cukup di sawah maka petani tidak dapat bekerja di sawah dan tidak jarang mereka tidak mendapat penghasilan untuk kehidupan mereka dalam kurun waktu tertentu.

Indikator Efektivitas Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Sungai Tarab

Penelitian ini berusaha menjelaskan variabel-variabel yang saling berkaitan dan dapat menghambat proses pelaksanaan dan kinerja program kebijakan, termasuk bagaimana program layanan bajak gratis di Kecamatan Sungai Tarab dijalankan dan faktor penghambatnya. Variabel tersebut meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Program Bajak Gratis menyasar kepada para petani penggarap yang tergolong masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Penentuan nama-nama penerima yang berhak terpilih sebagai penerima layanan bajak gratis di Kecamatan Sungai Tarab diseleksi oleh Dinas Pertanian berdasarkan kriteria yaitu 1) petani penggarap terdaftar ke dalam DTKS; 2) petani tergabung sebagai Poktan dan terdaftar dalam SIMLUHTAN; dan 3) menggarap lahan paling luas 1 (satu) hektar. DTKS digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi petani yang dapat menerima bantuan tersebut merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang masuk dalam kategori KK miskin. DTKS menampilkan informasi tentang identitas, kondisi ekonomi, dan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan adanya DTKS masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, akses ke layanan sosial, dan pendampingan sosial. Sosialisasi program pada penelitian ini dibangun atas hasil wawancara dengan para informan yang terbagi atas tiga aspek yaitu 1) ketersediaan informasi dan kejelasan informasi, 2) frekuensi sosialisasi, 3) keterlibatan kelompok sasaran. Ketersediaan informasi mengenai program harus tersedia secara lengkap dan mudah diakses oleh kelompok sasaran. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti brosur, baliho, spanduk website, media sosial, atau pertemuan langsung. Kemudian sosialisasi program harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan guna membantu kelompok sasaran untuk tetap mengingat informasi mengenai program. Serta kelompok sasaran harus terlibat aktif dalam sosialisasi program agar meningkatkan pemahaman program secara lebih mendalam. Sosialisasi tidak hanya dilaksanakan sekali atau dua kali, tetapi untuk mendapatkan upaya sosialisasi yang efektif harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Selain meresmikan suatu program, sosialisasi harus diberlangsungkan pada lokasi atau sudut yang strategis sehingga dapat memusatkan penyeberluasan informasi dan memudahkan jangkauan kelompok sasaran untuk menerima informasi. Pendekatan yang efektif dibutuhkan dalam rangka mensosialisasikan program secara luas seperti kantor wali nagari dan kediaman kelompok tani. Menurut laman aplikasi bajak gratis pada laman bajak-gratis.tanahdatar.go.id, tujuan pelaksanaan program bajak gratis meliputi mengurangi biaya produksi, percepatan tanam, meningkatkan produksi, peningkatan

pendapatan. Kelima tujuan tersebut dikaji secara bertahap yang dimulai dari dampak pengurangan biaya produksi tersebut bagi petani.

Dari hasil wawancara ditemui bahwa pihak Dinas Pertanian terus melakukan upaya pengkajian terhadap ketercapaian tujuan tersebut. Dengan mengurangi biaya produksi petani, pendapatan petani dapat meningkat. Selanjutnya, dengan adanya layanan ini petani dapat mempercepat waktu tanam artinya petani tidak perlu lagi menunggu waktu membajak jika terkendala biaya sehingga dengan adanya bantuan ini proses pembajakan dapat dipercepat karena pada akhirnya upah pembiayaan operator bajak akan digantikan atau ditutup dengan bantuan tersebut ataupun jika petani tidak memiliki alsintan traktor untuk membajak, petani dapat menggunakan layanan traktor pada pola 1 dan 3 dari layanan bajak gratis. Namun, yang menjadi fokus utama dalam pengkajian output dari bajak gratis adalah pengurangan biaya produksi usahatani padi dalam urusan pembajakan. Pemantauan pada penelitian ini berupaya mengidentifikasi perkembangan atas pelaksanaan program bajak gratis dan masalah yang menghambat pelaksanaan itu sendiri serta menjelaskan upaya dari petugas pelaksana dalam menindaklanjuti masalah tersebut sehingga program dapat dievaluasi dan disempurnakan. Pemantauan terhadap pelaksanaan program dilaksanakan oleh petugas pelaksana program yang ditunjuk yaitu aparat Dinas Pertanian beserta fungsional terkait. Pemantauan berupa monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan terhadap realisasi program dan dikoordinasikan secara intensif. Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemantauan dilakukan saat program dilaksanakan. Pemantauan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam sebuah rapat internal oleh Kabid Dinas Pertanian Kabupaten, Penyuluh Kabupaten, Brigade Alsintan, serta seluruh pihak terkait. Dalam forum tersebut dibahas secara intensif mengenai persentase operasional bajak gratis, pengurusan permohonan, jumlah pemohon, upah yang harus dibayarkan, selalu dikonfirmasi kepada Kabid Penyuluhan setiap pekannya. Monev tersebut merupakan upaya evaluasi secara keseluruhan terhadap kinerja baik di kecamatan maupun gabungan, koordinasi berjalan antar manajer kecamatan dalam rangka percepatan pemenuhan target operasional dalam setahun. Pemantauan rutin terus dilakukan melalui grup media sosial dan aplikasi bajak gratis oleh para petugas.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Sungai Tarab

Pelaksanaan program bajak gratis di Kecamatan Sungai Tarab yang dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui brigade alsintan Manajer Brigade Alsintan Kecamatan Sungai Tarab yang dibantu oleh pihak terkait dalam memberikan bantuan tunai kepada petani telah mencapai hasil yang efektif, namun terdapat beberapa kendala dalam prosesnya. Terutama dalam hal penyaluran bantuan yang berkualitas dan tepat sasaran serta pemerataan bantuan. Dari hasil penelitian yang ditemukan tentang program bajak gratis di Kecamatan Sungai Tarab ditemukan beberapa faktor penghambat, adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Validasi DTKS dinilai kurang optimal. Pada awal program ini dijalankan, masalah yang muncul pertama kali adalah masalah validasi data DTKS dan SIMLUHTAN. Menurut prosedur yang berlaku, petugas mengidentifikasi dan menyinkronkan data NIK petani pada DTKS dan NIK petani yang sama pada SIMLUHTAN. Adapun, fakta yang penulis temukan yaitu adanya keterlambatan persiapan dari pihak pelaksana (Dinas Pertanian) untuk menyinkronkan data tersebut. Dari hasil wawancara dengan Bapak Wel Embra selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana, dan Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, menunjukkan bahwa Program Bajak Gratis menggunakan DTKS sebagai kriteria petani yang bisa terpilih. Namun, DTKS tersebut dianggap kurang lengkap dan kredibel

untuk memuat data petani secara lebih luas. Sehingga dari 25 orang anggota kelompok yang ada hanya 3 orang yang terpilih. Angka yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah petani penggarap yang banyak tersebar di Kecamatan Sungai Tarab.

2. Anggaran. Realisasi program bajak gratis memerlukan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Besar kecilnya anggaran dapat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan program seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk realisasi program bajak gratis tahun 2022 pemerintah telah menghabiskan dana yang cukup besar, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Beberapa Anggaran yang digunakan untuk operasional Program Bajak Gratis Tahun 2022 di Kabupaten Tanah Datar

No	Bidang/Kegiatan	Tahun 2022	
		Satuan	Realisasi
1.	BBM Operasional Bajak Gratis Spesifikasi: Dexlite	4.700 liter x 9.700	Rp45.590.000
	BBM Operasional Bajak Gratis Spesifikasi: Pertalite	41.000 liter x 7.850	Rp321.850.000
2.	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Upah Operator Hand Tractor Roda Dua	4.200 Ha x 800.000	Rp3.360.000.000
3.	Biaya Pemeliharaan Alsintan Jasa Service Handtractor	1 tahun x 2.000.000	Rp2.000.000
4.	Belanja Modal Kendaraan Angkutan Barang Mobil Pick-up	3 Unit x 220.000.000	Rp660.000.000
5.	Belanja Pengadaan Hand Traktor Hand Traktor	56 unit x 12.255.000	Rp686.308.000

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwasanya pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengeksekusi sejumlah anggaran. Belanja tersebut dikeluarkan untuk membiayai fasilitas dan komoditas bantuan yang akan digunakan yaitu Hand-Traktor untuk alat pendukung layanan bajak gratis (pola bantuan 1 & 3) sebanyak 56 unit senilai Rp686.308.000, kemudian 3 unit mobil pick-up pengangkut traktor senilai Rp660.000.000, dan belanja pemeliharaan alsintan untuk 1 tahun senilai Rp2.000.000. Disamping itu, belanja komoditas bantuan yaitu belanja BBM Dexlite dan Pertamina senilai Rp367.440.000. Kemudian belanja upah operator adalah yang tertinggi sebab upah operator merupakan pengeluaran utama dalam membiayai bantuan bajak gratis kepada para petani dengan kuota 4.200 Ha senilai Rp3.360.000.000.

3. Prosedur Bantuan BBM bermasalah. Dari hasil wawancara oleh Kabid Penyuluhan, Sarana, dan Prasarana maupun bapak Dedi Surya selaku Manajer Bajak Gratis Kecamatan Sungai Tarab dapat dipahami petugas pelaksana telah berupaya mengadakan kerjasama dengan pihak Pertamina untuk pengadaan BBM untuk bantuan bajak gratis dan juga telah mengirimkan surat rekomendasi permintaan bantuan BBM kepada SPBU setempat. Akan tetapi, hingga Juni 2022, pengadaan BBM tersebut mengalami masalah yaitu pengambilan BBM di SPBU dilarang menggunakan jeregen, karena dalam aturan nasional SPBU dilarang dan tidak diperkenankan melayani konsumen yang membeli BBM menggunakan jerigen. Pada akhirnya bantuan BBM solar tersebut tidak berjalan lagi. Sehingga pada tahun 2023 bantuan BBM diputuskan untuk ditiadakan dan pembiayaan anggarannya lebih difokuskan untuk upah operator dan belanja operasional program. Dari hasil wawancara dengan bapak Dedi Surya selaku manajer brigade alsintan kecamatan Sungai Tarab untuk Program Bajak Gratis ditemukan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian telah terjadi koordinasi dan pengambilan stok BBM untuk bantuan bajak gratis dan telah berlangsung proses penyaluran bantuan BBM kepada para petani. Pada waktu itu sebelumnya tenaga mobilisasi brigade alsintan telah menyetok BBM dari SPBU menggunakan jerigen untuk disalurkan kepada manajer agar kemudian dibagikan kepada petani, hingga pemberlakuan prosedur tersebut menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga diputuskan oleh Dinas Pertanian agar bantuan BBM tersebut diberhentikan. Sehingga hanya sebagian kecil kelompok tani yang mendapat bantuan BBM.

Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kenyataan di lapangan terjadi pemberhentian bantuan BBM di tengah-tengah proses pelaksanaan layanan bajak gratis di Kecamatan Sungai Tarab tahun 2022. Kendala tersebut hingga saat ini belum mendapatkan solusi permasalahan mengenai prosedur yang baik dan aman untuk memberlakukan penyaluran bantuan BBM untuk program bajak gratis.

4. Sawah Kekeringan. Menurut keterangan dari seorang Ketua Kelompok Tani Sawah Luar di Nagari Padang Laweh menerima pemberitahuan atas anggotanya yang terpilih sebagai penerima. Akan tetapi, bantuan tersebut tidak bisa diklaim oleh petani yang bersangkutan disebabkan lantaran sawah mereka yang mengalami hambatan. Dari hasil wawancara dengan bapak Ali Yurdi selaku Ketua Kelompok Tani Sawah Luar di Piliang Laweh Jorong Sungai Tarab diketahui bahwasanya kondisi cuaca kemarau yang cukup ekstrim dapat merusak kelembaban sawah. Ditambah pada sawah petani tersebut tidak terdapat irigasi di sekitar sawah tersebut putus akibat gelodo jadi tidak ada irigasi yang baik untuk mengantarkan air guna proses pembajakan sehingga ini mengakibatkan sejumlah sawah tersebut sangat bergantung terhadap hujan. Sedangkan Irigasi dikenal sebagai upaya pemberian air untuk kebutuhan pertanian agar tanaman mendapat kelembaban yang berguna. Tanpa irigasi, pasokan air di musim kemarau sangat terbatas. Kondisi ini bisa berdampak pada penundaan pembajakan sawah petani alih-alih petani telah terpilih sebagai penerima.

Pembahasan Efektivitas Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab)

Sebelumnya telah disajikan data dan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan program bajak gratis di Kecamatan Sungai Tarab. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bagaimana pelaksanaan program layanan bajak gratis di Kecamatan Sungai Tarab tersebut telah terselenggara secara efektif baik secara prosedur teknis pelaksanaan ataupun realitas capaiannya dalam dampaknya terhadap kepada para petani. Jika dilihat dari indikator standar pelaksanaan program layanan bajak gratis di kecamatan Sungai Tarab adalah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 56 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bajak Gratis yang kemudian diganti dengan peraturan terbaru oleh Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2022 tentang peraturan tersebut yang melonggarkan penetapan kriteria petani penggarap yang diwajibkan terdaftar di dalam DTKS menjadi tidak wajib (namun tetap diutamakan), sehingga hanya mewajibkan petani tergabung ke dalam kelompok tani yang terdaftar di dalam Simluhtan. Sebab tujuan awal penyaluran bantuan bajak gratis ini, diselenggarakan untuk petani penggarap yang tergolong ke dalam masyarakat miskin yang ditandai dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dan kelonggaran tersebut menghasilkan irisan golongan petani, yaitu petani yang telah terdaftar dalam DTKS dan petani yang juga dikategorikan berpenghasilan rendah namun belum terdaftar dalam DTKS. Hal tersebut dilakukan lantaran banyak petani penggarap di kelompok tani tidak terdaftar di dalam DTKS. Kondisi tersebut adalah indikasi bahwa update data DTKS petani tidak berjalan optimal, pemutakhiran data belum maksimal dilaksanakan oleh pihak terkait baik wali jorong, wali nagari maupun TSKS dan Dinas Sosial untuk membantu para petani mendapatkan informasi dan berpartisipasi untuk mendaftar dalam DTKS. Data penerima sistem jaringan pengaman sosial akan menjadi lebih baik jika pemerintah daerah proaktif memperbarui DTKS agar dapat mendukung kesuksesan sistem Program Bajak Gratis.

Penulis menemukan kelonggaran DTKS sebagai syarat petani telah merubah sistem pemilihan petani yang awalnya dilakukan secara selektif oleh Dinas Pertanian berubah menjadi

sangat terbuka. Hal ini membuka celah terjadinya monopoli bantuan oleh oknum. Untuk meminimalisir potensi kecurangan tersebut serta upaya pemerataan penyaluran bantuan kepada petani yang belum mendapatkan bantuan, maka penguatan terhadap peran petugas pelaksana menjadi penting guna menjaga keberlangsungan proses pemilihan petani penerima secara adil dan tepat kepada petani prioritas. Dengan menggalakkan komunikasi kepada petani dan mensosialisasikan terkait kejelasan jatah bantuan tersebut dan keterbatasan sisa kuota sebab tidak jarang ditemui sebagian petani telah memasukkan permohonan namun ternyata kuota bantuan telah habis, dari sisi ini diperlukan penguatan peran petugas pelaksana (manajer dan penyuluh pertanian) untuk memaksimalkan program bajak gratis dengan pelayanan dan komunikasi yang efektif kepada petani.

Ketepatan sasaran program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dan tim lapangan yaitu manajer dan penyuluh dalam penyeleksian petani penerima bajak gratis telah berjalan dengan cukup baik. Ditandai dengan sistem penyeleksian secara langsung oleh petugas guna menyeleksi petani yang sesuai dengan kriteria serta mempertimbangkan kondisi sawah yang layak dibajak dalam waktu dekat. Peran petugas telah dijalankan dengan baik dalam setiap proses mulai dari pengurusan administrasi, pengukuran sawah, pendokumentasian sawah serta pembuatan laporan hasil pembajakan oleh Dinas telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel jika dilihat berdasarkan observasi dan studi dokumen. Pelaksanaan program bajak gratis tersebut sudah memiliki SOP dan ketentuan yang jelas. Dengan begitu, ketepatan sasaran program bajak gratis dinilai telah tepat sasaran berdasarkan proses penyeleksian secara teknis telah dinilai baik dan dilakukan secara akuntabel. Serta, untuk mendukung kelancaran proses di lapangan diperlukan tambahan tenaga petugas agar mempercepat proses administrasi pendaftaran petani dan pengukuran sawah yang ingin dibajak.

Upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh petugas di lapangan kepada masyarakat (petani). Ditandai dengan penyelenggaraan launching program secara simbolik, kemudian forum sosialisasi yang diadakan di Kantor Wali Nagari di nagari tertentu yang diikuti secara anutusias oleh para petani penerima dengan bantuan peran ketua kelompok tani dan pihak terkait. Di masing-masing kelompok tani juga sembari petugas mendatangi kelompok tani secara bergiliran, secara langsung telah terjadi komunikasi dan interkasi antara petugas dan petani dalam memahami sistem dan prosedur pelaksanaan bajak gratis di lapangan. Sosialisasi secara tidak langsung juga dilaksanakan melalui sejumlah media publik yang disebarakan berbentuk pamflet, baliho yang ditempatkan di lokasi strategis seperti kantor BPP Sungai Tarab, Kantor Camat Sungai Tarab, dan di sejumlah Kantor Wali Nagari yang berisi informasi seputar prosedur bajak gratis dan informasi kontak petugas manajer di kecamatan masing-masing dan juga melalui radio tanah datar dan video tron di pusat kota. Sehingga proses sosialisasi dinilai telah berjalan dengan sangat baik.

Tujuan program bajak gratis dinilai dapat membantu perekonomian petani lewat bantuan pembajakan sawah berupa bantuan tunai tersebut. Hal ini dilihat dari pada respon petani penerima bantuan, semuanya merespon program tersebut dengan baik, walaupun biaya tersebut tidak sepenuhnya dibantu akan tetapi para petani merasa senang karena dengan bantuan tersebut biaya produksi mereka sangat terbantu. Dalam poin tujuan, a) penurunan biaya produksi: dinilai cukup efektif dalam menurunkan biaya produksi petani, biaya pribadi petani bisa dikeluarkan untuk keperluan lain (pupuk, upah tanam, keperluan pribadi, dsb) (Wahyu, 2022). Selanjutnya, menurut pengakuan petani penerima bajak gratis merasakan bahwa bantuan bajak gratis telah meningkatkan produktivitas petani. Hal ini sejalan dengan penelitian Pitriani, dkk. yang menemukan bahwa produktivitas padi berkaitan erat dengan traktor tangan sebesar 64,4%. Petani sering menggunakan traktor tangan pada setiap musim

tanam, dan petani mengakui bahwa penggunaan traktor tangan berdampak pada produksi padi. Meskipun dampak ini tidak secara langsung seperti penggunaan pupuk, traktor tangan mampu meningkatkan kesuburan tanah karena mereka membajak tanah lebih dalam dan lebih lembut daripada traktor manual. Juga penelitian ini didukung oleh penelitian Mahdalena di tahun 2007 produktivitas padi meningkat 30 % lebih besar dengan menggunakan traktor tangan dibandingkan cara manual (Pitriani dkk., 2021). Sejalan juga dengan penelitian Adi Suyatno, dkk yang menemukan bahwa terdapat efek penggunaan traktor untuk pengolahan tanah (pembajakan) mampu meningkatkan produktivitas sebanyak 667 kg/ha (Suyatno dkk., 2018). Dengan demikian, melalui program bajak gratis mengupayakan pembajakan sawah petani diselenggarakan menggunakan traktor tangan secara optimal melalui bantuan upah bajak agar meminimalisir pembajakan dengan menggunakan cara manual (cangkul). Namun, menurut observasi lapangan manfaat tersebut tidak terlihat dengan baik disebabkan kerugian hasil produksi yang dilanda oleh hama pada sejumlah sawah di Kecamatan Sungai Tarab berdasarkan hasil wawancara dengan petani. Sehingga dapat disimpulkan pada poin b) Peningkatan produksi: program bajak gratis secara tidak langsung berperan dalam meningkatkan produktivitas dan hasil produksi padi, sehingga dinilai cukup meningkat namun kurang efektif. Kemudian, dampak pelaksanaan program bajak gratis terhadap peningkatan pendapatan petani tidak menunjukkan hasil yang cukup baik. Peningkatan pendapatan petani bergantung terhadap hasil produksi padi yang dipanen pada setiap musim tanam. Namun, selama proses dilaksanakannya program bajak gratis di kecamatan Sungai Tarab, informan penerima bajak gratis merasakan sedikit peningkatan pendapatan akibat bantuan bajak gratis. Dimana pada saat itu beberapa petani merasakan pendapatan yang sedikit meningkat dibandingkan tanpa adanya bajak gratis namun seperti yang telah disebutkan pada poin b, meskipun adanya peningkatan produksi akan tetapi dari sisi pendapatan petani justru menurun akibat hasil produksi yang tidak maksimal disebabkan musim hama tikus yang banyak menyerang sawah petani di kecamatan Sungai Tarab. Hal ini harus menjadi sebuah perhatian oleh petugas pelaksana program untuk memastikan bahwasanya bantuan bajak gratis saja tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan petani, jika perhatian terhadap pengendalian dan pengentasan hama tidak diperhatikan. Sehingga dapat dipahami bantuan bajak gratis kurang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani. Selanjutnya, adapun dampak program bajak gratis terhadap percepatan tanam, cukup efektif. Palsalnya dengan adanya bantaun bajak gratis telah membantu para petani yang terkendala dalam pembiayaan ataupun kekurangan alsintan (traktor tangan) di tempat tinggal mereka.

Upaya pemantauan telah dilakukan oleh petugas melalui forum monitoring dan evaluasi dengan sejumlah petugas terkait untuk membahas kendala dan kemajuan kinerja di lapangan. Rapat Monev tersebut dilakukan secara berkala setiap bulannya. Pemantauan tidak terlepas dalam setiap proses pelaksanaannya sebab petugas selalu turun tangan dalam berinteraksi dengan para petani penerima untuk mengurus setiap prosesnya, dan kehadiran tersebut meningkatkan upaya pemantauan program. Juga adanya komunikasi secara tidak langsung android antara pejabat pelaksana dan petugas di lapangan saling berkoordinasi untuk menanggapi segala kendala yang timbul di lapangan. Hal tersebut menjelaskan keseriusan para petugas pelaksana dalam memantau kelancaran program di lapangan. Oleh karena itu, pemantauan program bajak gratis dinilai telah cukup baik dalam mengawal setiap proses administrasi maupun penyaluran bantuan. Kemudian dalam penelitian ini didapatkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program yaitu belum ditemukannya prosedur yang tepat dalam memasok bantuan BBM dari SPBU. Bantuan BBM tersebut sangat dibutuhkan oleh operator, namun harapan ini belum bisa ditunaikan oleh pelaksana program. Selain itu faktor kekeringan dapat menghambat bantuan bajak gratis

secara tidak langsung terhadap sawah tadah hujan yang cukup banyak ada di Kecamatan Sungai Tarab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab), serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program layanan bajak gratis yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan. Maka dalam sub-bab ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses pelaksanaan penyaluran bantuan tunai bajak gratis yang dilaksanakan unit brigade alsintan kecamatan Sungai Tarab bersama dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar beserta jajaran dinilai cukup efektif dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam bagi para petani penggarap. Dari keempat faktor efektivitas yang digunakan terhadap tujuan program telah mencerminkan proses pelaksanaan program yang paling efektif terletak pada poin tujuan program untuk penurunan biaya produksi padi dan percepatan tanam sedangkan yang kurang efektif terletak pada tujuan program untuk peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan. (2) Adapun faktor yang menghambat program ini adalah sebagian bantuan tidak mempunyai sistem pemasokan yang baik, sehingga bantuan BBM terpaksa diberhentikan di tengah jalan akibat cara pemasokan BBM dari SPBU dilarang menggunakan jirigen. Kemudian faktor kekeringan akibat musim kemarau pada sawah tadah hujan secara tidak langsung sedikit menghambat pelaksanaan dimana petani tersebut tidak bisa menggunakan bantuan lantaran sawah kekeringan.

Ucapan Terima Kasih

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar beserta jajaran, bapak/ibu penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sungai Tarab, dan Manajer Sub-Brigade Alsintan Kecamatan Sungai Tarab kemudian bapak/ibu petani yang bersangkutan yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi tentang Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sebagaimana adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilosa, A., Zulhaida, & Nurjana, M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *IJBEM: Indonesian Journal of Business Economics and Management*, 1(2), 19–26.
- Intania, M. (2023). Quo Vadis Program Bajak Gratis: Melihat Data dan Fakta. <https://jurnalminang.com/quo-vadis-program-bajak-gratis-melihat-data-dan-fakta/> <https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis Data Kualitatif. Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Pitriani, Fauzan, & Fikriman. (2021). Hubungan Teknologi Alsintan Terhadap Produktivitas Padi Sawah Di Desa Sungai Puri Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. *Jurnal Agribisnis*, 23(1), 127–128.
- Suyatno, A., Imelda, I., & Komariyati, K. (2018). Pengaruh Penggunaan Traktor Terhadap Pendapatan dan Penggunaan Tenaga Kerja pada Usahatani Padi di Kabupaten Sambas. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/agr.4264>
- Wahyu, M. (2022). Efektivitas Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Studi Kasus Kelompok Tani Kecamatan Tualang). *Cross-Border*, 5(1), 848–861.